

Komisi II DPRD Rohul Tinjau PT SPR Langgak dan PT SPE Pendalian

TANDUN, DETIL - Komisi II DPRD kabupaten Rokan Hulu melakukan peninjauan ke PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak, Kecamatan Tandun, dan PT Sumatera Persada Energi (SPE) Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Rabu (23/5). Peninjauan ke perusahaan yang bergerak dibidang pemboran sumur minyak dipimpin Ketua Komisi II Murkhas Al Bonel SPD didampingi para anggota Komisi II, Kadis Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu Bisman B.

Mereka diterima Humas PT SPR Langgak Rafiq Adriansyah, Dalam peninjauan tsb, komisi II minta agar kerja sama antara PT SPR Langgak dengan Pemkab Rokan Hulu dapat semakin ditingkatkan terutama dalam hal pembangunan Infrastruktur jalan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Humas PT SPR Langgak Rafiq Adriansyah sejak perusahaan ini beroperasi sejak April 2010, telah banyak merealisasikan CSR (Corporate Social Responsibility) baik kepada Pemkab Rokan Hulu, maupun kepada masyarakat.

Pada tahun 2010, melakukan pasar murah untuk masyarakat kecamatan Tandun sebanyak 350 paket sembako, dan pada tahun 2011 sebanyak 500 paket sembako dengan discount 70 persen. Selain itu, juga telah merealisasikan beberapa proposal dibidang pendidikan, budaya, dan agama. Saat ini telah memiliki 3 sumur, yakni di PTPN V kebun Tandun, di PT Budi Murni, dan di lahan milik masyarakat, ungkapnya. Diharapkan dengan pertemuan ini, dapat memfasilitasi perusahaan dengan Pemkab Rokan Hulu dan DPRD, terang Rafiq.

Di PT SPE Pendalian rombongan komisi II dan pemkab Rokan Hulu, diterima Manajer Dedy Rahayu dan staf BP MIGAS. Sama halnya dengan PT SPR, komisi II juga minta kerjasama yang saling menguntungkan antara PT SPE dengan Pemkab rokan Hulu dalam memajukan pembangunan, baik

dibidang infrastruktur maupun yang menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepada sejumlah wartawan, Dedy memaparkan, perusahaan baru beroperasi selama 6 bulan, namun telah merealisasikan CD (Community Development) berupa pembangunan jalan sepanjang 5 km dengan title 3b (pengerasan). Saat ini telah dibangun 11 sumur, akan tetapi baru beroperasi 3 sumur sedangkan 8 sumur masih dalam tahap pengembangan. Dedy juga mengungkapkan, beberapa kendala yang dihadapi perusahaan dalam hal pembukaan sumur minyak tersebut. Di antaranya adalah pembebasan lahan masyarakat.

"Hendaknya hal ini menjadi perhatian pemkab Rokan Hulu, sebab hal ini akan berkaitan dengan peningkatan produksi minyak, jika produksi minyak meningkat, tentu CSR dan CD akan dapat dialokasikan dengan jumlah yang lebih besar pula," terang Dedy.

Ketua Komisi II Murkhas Al Bonel, S.Pd, kepada sejumlah wartawan menjelaskan, kita menghendaki agar perusahaan didalam membuat program agar transparan, sehingga masyarakat mengetahui bahwa perusahaan sumur minyak tersebut telah menyalurkan bantuan CD dan CSR nya untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian juga agar tidak terjadi program yang mubazir, antara program pemerintah dengan program perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dan sebaliknya dapat saling melengkapi.

"Selain itu, melalui peninjauan ini, pihak legislatif sudah mengetahui keberadaan kedua perusahaan pemboran sumur minyak dimaksud, dan ini tentu akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten," terang Murkhas.(dol)